

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai. Cepat, aman, nyaman, mudah dan efisien dalam bertransaksi merupakan alasan masyarakat Indonesia memiliki respon yang besar terhadap sistem pembayaran non tunai dan sistem pembayaran non tunai ini telah dikembangkan oleh pihak bank maupun non bank sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan tingkat persaingan bank yang semakin tinggi mendorong sektor perbankan atau non bank untuk semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran non tunai berupa sistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik (*electronic card*

payment) yang aman, cepat dan efisien, serta bersifat global (Santomero dan Seater, 1996).

Sistem pembayaran yang efisien dapat diukur dari kemampuan dalam menciptakan biaya yang minimal untuk mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan transaksi. Pengguna jasa alat pembayaran akan menggunakan jasa alat pembayaran yang memiliki harga yang relatif lebih rendah sehingga biaya transaksi yang harus dikeluarkan juga rendah. Melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan kecepatan transaksi, inovasi pembayaran elektronik membuat sistem pembayaran non tunai lebih efektif (Snellman dan Vesalla, 1999).

Saat ini pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia berupa barang dan jasa dapat diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran non tunai yang bersifat elektronik. Menurut Listfield dan Montes-Negret (1994), sistem pembayaran yang tanpa kertas ini tidak hanya efektif untuk transaksi bernilai besar, melainkan juga untuk pembayaran rutin (seperti listrik, air ledeng, serta gaji) serta pembayaran yang sensitif terhadap waktu (seperti, pembayaran bunga).

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas yang mengatur bidang sistem pembayaran di Indonesia telah mencanangkan Grand Desain Upaya Peningkatan Penggunaan Pembayaran NonTunai atau sering disebut dengan *Toward a Less Cash Society* (*LCS*). Perkembangan transaksi pembayaran menuju *Less Cash Society* merupakan arah perubahan yang tidak dapat dihindari. Transaksi dengan pembayaran uang secara fisik sudah mulai digantikan oleh sistem pembayaran non tunai. Dengan keuntungan

yang diperoleh negara melalui penghematan biaya transaksi, diharapkan adanya kecenderungan arah perubahan transaksi tunai menuju transaksi non tunai. *Less cash society* dapat didefinisikan sebagai budaya atau tren yang berkembang di masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan media pembayaran non tunai. (Van Hove, 2006:21).

Menurut Bank Indonesia (2004), instrumen pembayaran non tunai dapat dibagi kedalam tiga kategori berdasarkan fisik alat yang digunakan, yaitu :

1. Instrumen- instrumen berbasis warkat/kertas atau *paper based instrument*.
2. Instrumen- instrumen berbasis kartu atau *card based instruments*.
3. Instrumen- instrumen berbasis elektronik atau *electronic based instruments*.

Sistem pembayaran adalah suatu mekanisme yang menunjukkan adanya aliran sejumlah nilai dari pembeli ke penjual dalam sebuah transaksi. Jika dikaitkan dengan isu perkembangan sistem pembayaran elektronik yang ternyata terbukti lebih efisien dari sistem pembayaran *paper based* maka dapat dikatakan sistem pembayaran mengalami proses menuju yang lebih efisien. Sejak berkembangnya sistem pembayaran non tunai elektronik memerlukan biaya hanya sepertiga sampai setengah dari sistem pembayaran non tunai berbasis kertas (*paper based*) maka jelaslah bahwa biaya sosial dalam sistem pembayaran dapat dikurangi dengan mengimplementasikan sistem pembayaran elektronik (Humphrey, 2001).

Beberapa instrumen pembayaran non tunai yang berkembang di masyarakat sekarang ini, selain yang umum diketahui seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, kartu prabayar, kartu klub serta *e-banking* (Bank Indonesia, 2004). Isu paling sentral dalam studi mengenai sistem pembayaran elektronik dewasa ini adalah inovasi sistem pembayaran elektronik berbasis kartu, terutama Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik (*e-money*).

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah seluruh instrumen sistem pembayaran yang pada umumnya berbasis kartu antara lain: kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit, kartu debit, serta jenis kartu lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti misalnya kartu smart, *e-wallet*, serta beberapa alat pembayaran lain yang dapat dipersamakan dengan kartu (Bank Indonesia, 2005). Pembayaran elektronik tersebut, pada awal perkembangannya masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya.

Dalam perkembangannya, beberapa negara telah menemukan dan menggunakan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*), yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya APMK (kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit). *E-money* tidak memerlukan proses otorisasi dan keterkaitan langsung (*on-line*) dengan rekening nasabah di bank karena *e-money* merupakan produk *stored value* yaitu penyimpanan nilai dana tertentu (*monetary value*) telah tersimpan dalam alat pembayaran yang digunakan. *Bank for International Settlement* (BIS, 1996) mendefinisikan uang

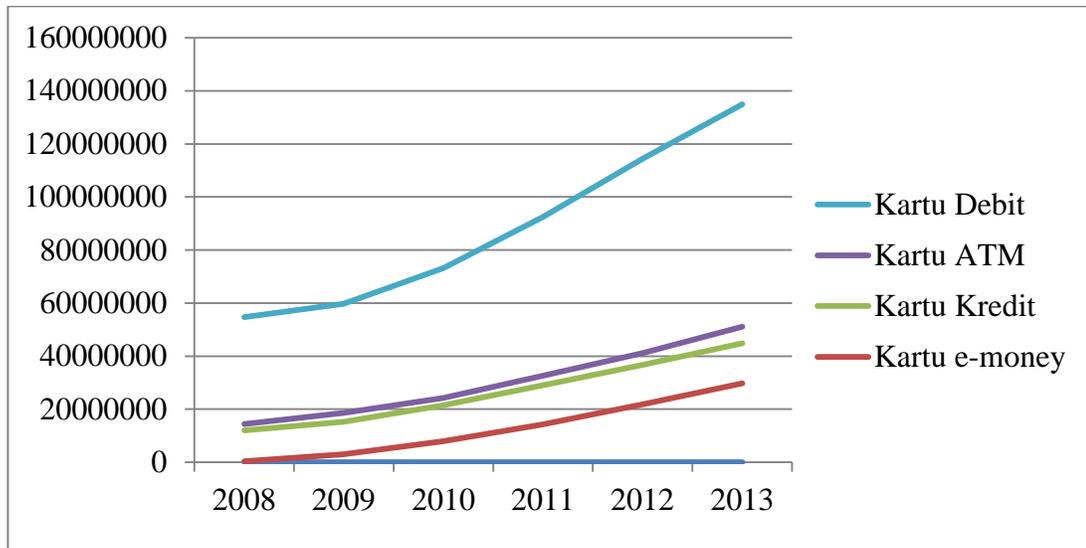
elektronik (*e-money*) sebagai produk *stored-value* atau *prepaid card* dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) disimpan secara elektronis dalam suatu peralatan elektronis.

Bank Indonesia mencatat telah ada 22 penerbit kartu kredit yang terdiri dari dua puluh bank dan dua lembaga selain bank. Penerbit kartu ATM tercatat sebanyak 50 penerbit. Sementara itu, sudah terdapat 56 buah bank yang menerbitkan kartu debit. Sedangkan penerbit uang elektronik ada 17 penerbit yaitu terdiri dari sembilan bank dan delapan lembaga non bank.

Pengembangan instrumen sistem pembayaran non tunai berbasis kartu elektronik di Indonesia memiliki potensi yang besar. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan transaksi dengan menggunakan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan *e-money* yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, adanya kemudahan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi, kecenderungan dan tuntutan masyarakat untuk bertransaksi dengan menggunakan instrumen yang lebih efisien dan aman, serta beberapa keunggulan instrumen pembayaran elektronik dibandingkan dengan penggunaan uang tunai telah mendorong Bank Indonesia untuk lebih mengupayakan terciptanya masyarakat yang berkecenderungan non tunai.

Metode pembayaran secara transfer antar rekening bank semakin banyak menggantikan peran uang dalam perdagangan besar dan transaksi keuangan nilai besar, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu khususnya dalam bentuk kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, maupun *stored value card / prepaid card* seperti

e-money telah mulai menggantikan peran uang tunai dalam pembayaran retail (Lahdenpera, 2001).



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Gambar 1. Jumlah APMK dan E-Money yang Beredar di Indonesia Tahun 2008–2013

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah kartu pembayaran elektronik yang beredar merefleksikan kepercayaan masyarakat dan tuntutan akan sistem pembayaran yang lebih efisien sangat besar diindikasikan dari jumlah kartu pembayaran elektronik beredar di masyarakat yaitu mencapai 1.044.703.350 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Masyarakat pada umumnya telah memiliki kepercayaan bahwa sistem pembayaran elektronik yang mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan dapat meningkatkan efektifitas dalam sistem pembayaran yang juga akan menunjang aktivitas kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia.

Hal ini yang menarik perhatian para ekonom untuk melakukan kajian ekonomi mengenai sistem pembayaran elektronik dalam cakupan yang lebih luas, tidak hanya sebatas sektor perbankan saja. Penelitian mereka berkesimpulan sama, yaitu besarnya manfaat sistem pembayaran elektronik terhadap perekonomian suatu negara khususnya bagi lembaga keuangan. Secara empiris, dalam prakteknya di dunia nyata, keberadaan sistem pembayaran elektronik menuntut penyedia jasa pembayaran (dalam hal ini perbankan) mencari cara untuk meningkatkan manfaat jasanya bagi para nasabah yaitu dengan cara menurunkan biaya transaksi. Begitu pula dengan para pebisnis dan pengusaha, mereka akan mencari cara untuk meminimalisir biaya transaksi mereka, khususnya yang terkait dengan penggunaan jasa perbankan.

Perkembangan penggunaan sistem pembayaran elektronik akan memberikan kemudahan transaksi yang akan mendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi (Dias, 2001). Penggunaan pembayaran elektronik selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penurunan biaya transaksi dan penghematan waktu juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga yang diperoleh dari dana kas yang seharusnya dibawa dalam setiap kali bertransaksi namun ditempatkan di bank dalam bentuk tabungan. Dari sisi bank atau lembaga penerbit alat pembayaran non tunai, peningkatan penggunaan pembayaran elektronik merupakan sumber pendapatan berbasis biaya (*fee base income*) karena nasabah pengguna pembayaran elektronik akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Selain itu, *fee based* juga diperoleh dari biaya yang dikenakan untuk jenis transaksi tertentu misalnya untuk

transfer atau pembayaran tagihan. Khusus untuk alat pembayaran elektronik berbentuk *prepaid cards* atau *e-money*, penerbit memperoleh pendapatan tidak hanya dari *fee based income* namun juga dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga (*interest-free debt financing*) sebesar saldo *e-money* yang ada di penerbit.

Peningkatan penggunaan sistem pembayaran non tunai seperti APMK (kartu ATM, kartu debit, kartu kredit) dan uang elektronik (*e-money*) telah berdampak terhadap fungsi permintaan uang yang dimana permintaan uang merupakan salah satu faktor penting untuk bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter. Penggunaan alat pembayaran ini secara perlahan telah merubah pola hidup masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Sebagaimana diuraikan di atas, gambaran efek substitusi antara sistem pembayaran non tunai dengan uang tunai akan semakin terlihat jelas. Sebab, kini penggunaan kartu pembayaran jenis tersebut menjadi alternatif alat transaksi masyarakat selain uang. Bila ditinjau dari sudut ekonomi makro, apabila perekonomian secara luas menggalakkan penggunaan kartu pembayaran ini maka hal ini akan berpengaruh negatif terhadap permintaan uang (Yilmazkuday, 2006).

Seiring perkembangan APMK yang terdiri dari kartu kredit, kartu ATM dan kartu debit akan berpengaruh negatif terhadap permintaan uang kartal. Kartu kredit yang memiliki prinsip "*buy now, pay later*" yaitu dimana transaksi pemilik kartu ditanggung oleh penerbit kartu terlebih dahulu dan dilunasi oleh pemilik kartu pada jatuh tempo (waktu yang disesuaikan oleh kesepakatan antara pemilik kartu dan

penerbit kartu). Transaksi tersebut dapat memudahkan pemilik kartu karena tidak perlu membawa uang berlebihan pada saat akan melakukan transaksi, maka kartu kredit akan memiliki hubungan yang negatif terhadap permintaan uang kartal. Hal ini didukung oleh penelitian Sahabat (2009), bahwa transaksi kartu kredit memiliki hubungan yang negatif terhadap permintaan uang kartal.

Selanjutnya, kartu debit dan kartu ATM memiliki hubungan negatif terhadap permintaan uang kartal karena dalam penggunaannya dapat menunjukkan tingkat *awareness* masyarakat akan kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang ditawarkan dari penggunaan kartu debit dan kartu ATM tersebut sehingga, secara perlahan namun pasti penciptaan masyarakat *less cash* dapat berkembang di Indonesia dan kartu debit dapat mensubstitusi penggunaan uang kartal (Sahabat, 2009). Perkembangan *e-money* sebagai pengganti uang kartal dalam melakukan transaksi bernominal kecil seperti membayar tol, bensin, transportasi, dll akan berpengaruh negatif terhadap permintaan uang kartal.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata dalam sudut pandang ilmu ekonomi studi mengenai sistem pembayaran non tunai sangat menarik. Isu paling sentral dalam studi mengenai alat pembayaran elektronik dewasa ini adalah bagaimana pengaruh inovasi sistem pembayaran elektronik dengan kartu, dalam hal ini kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan *e-money* terhadap permintaan uang (*money demand*) khususnya di masyarakat luas suatu negara. (Yilmazkuday, 2006).

Ditinjau dari segi makroekonomi, adanya tambahan pendapatan yang diperoleh konsumen dari penggunaan *digital money* akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil (Dias, 2001).

Dewasa ini, masyarakat sudah mulai mengurangi kebiasaan untuk membawa uang dalam jumlah yang besar di dalam dompetnya karena selain dipandang tidak aman juga dinilai tidak praktis. Besar kecilnya uang yang dapat dibawa oleh masyarakat dalam dompet atau sakunya dapat dipertimbangkan sebagai kendala bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi. Kehadiran alat pembayaran non tunai berbentuk kartu menghilangkan kendala tersebut dan berpotensi untuk mendorong kenaikan tingkat konsumsi. Kemudahan dalam berbelanja yang diberikan bagi nasabah bank yang memiliki alat pembayaran non tunai dapat mendorong kenaikan konsumsi dari nasabah tersebut. Kenaikan konsumsi pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional dan dapat mendorong meningkatnya permintaan uang (*money demand*).

Dari sisi produsen, peningkatan konsumsi yang diikuti dengan efisiensi biaya transaksi akan meningkatkan profit bagi produsen yang kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan ekspansi usaha. Semakin efisien biaya transaksi yang diperoleh dari penggunaan alat pembayaran non tunai semakin besar potensi peningkatan output. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pemerintah,

penggalakkan penggunaan sistem pembayaran non tunai di masyarakat dalam jangka panjang akan menghemat biaya cetak uang.

B. Rumusan Masalah

Friedman, et al (1999) mengatakan, bahwa perkembangan teknologi informasi akan memberikan implikasi pada berkurangnya uang kartal (*base money*) dalam transaksi pembayaran. Inovasi sistem pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik transfer melalui pasar uang yang modern akan mengurangi kebutuhan dan permintaan akan perlunya memelihara sejumlah likuiditas (*reserve balances*) pada bank sentral.

Perkembangan yang cukup menarik perhatian saat ini adalah kompetisi yang terjadi antara alat-alat pembayaran elektronik tersebut (Greenspan, 1996). Jumlah penerbit kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan *e-money* serta volume transaksi dengan menggunakan kartu elektronik tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Perkembangan teknologi informasi (IT) telah memacu kompetisi ini untuk meningkatkan kepuasan nasabah terhadap layanan perbankan (Warjiyo, 2006).

Perekonomian di berbagai negara kini sedang mencari sistem pembayaran yang ideal (khususnya dalam transaksi pembayaran yang bernilai besar maupun kecil) dan aman (khususnya dalam menggunakan teknologi informasi internet). Pembahasan yang akan dianalisa pada penelitian ini adalah pengaruh penggunaan kartu elektronik (sebagai alternatif media transaksi masyarakat terhadap permintaan uang, khususnya di Indonesia. Walaupun masyarakat Indonesia belum mencapai tahap “*less cash*

society” karena terkendala dari kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu memegang uang. Namun, penggunaan kartu elektronik sebagai alat transaksi pembayaran telah mendapat tempat dan perhatian tersendiri bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Potensi pasar dan bisnis kartu pembayaran kini semakin meningkat seiring dengan bergulirnya proses pemulihan ekonomi. Disamping memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi, penggunaan alat pembayaran non tunai secara luas diduga memiliki implikasi pada berkurangnya permintaan terhadap uang yang diterbitkan bank sentral, *base money*, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter, khususnya dalam pengendalian besaran moneter (Costa dan Grauwe, 2001).

Beberapa kajian lainnya seperti dilakukan oleh Goodhart (2000), Freedman (2000), dan Woodford (2000) memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap implikasi perkembangan alat pembayaran non tunai pada kebijakan moneter. Mereka berpendapat bahwa perkembangan teknologi pembayaran tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter. Lebih lanjut, Lahdenpera (2001) dalam kajiannya menyatakan bahwa dampak perkembangan teknologi pembayaran terhadap pelaksanaan kebijakan moneter adalah tergantung pada tingkat preferensi masyarakat dalam memilih alat pembayaran untuk melakukan transaksi. Pramono, et al (2006) mencatat bahwa kenaikan pembayaran menggunakan kartu yaitu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan *e- money* dapat menurunkan permintaan uang kartal.

Terkait dengan perdebatan tersebut, penelitian ini mencoba menambah khasanah literatur dengan mengkaji dampak perkembangan alat pembayaran non tunai khususnya, pembayaran dengan kartu elektronik terhadap permintaan uang dengan studi kasus data Indonesia. Kajian ini relevan untuk dilakukan, mengingat pesatnya perkembangan teknologi sistem pembayaran dan instrumen pembayaran non tunai di Indonesia.

Dengan demikian permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan, yaitu:

1. Apakah penggunaan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan *e-money* berpengaruh terhadap permintaan uang kartal di Indonesia dalam jangka pendek?
2. Apakah penggunaan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan *e-money* berpengaruh terhadap permintaan uang kartal di Indonesia dalam jangka panjang?

C. Tujuan Penelitian

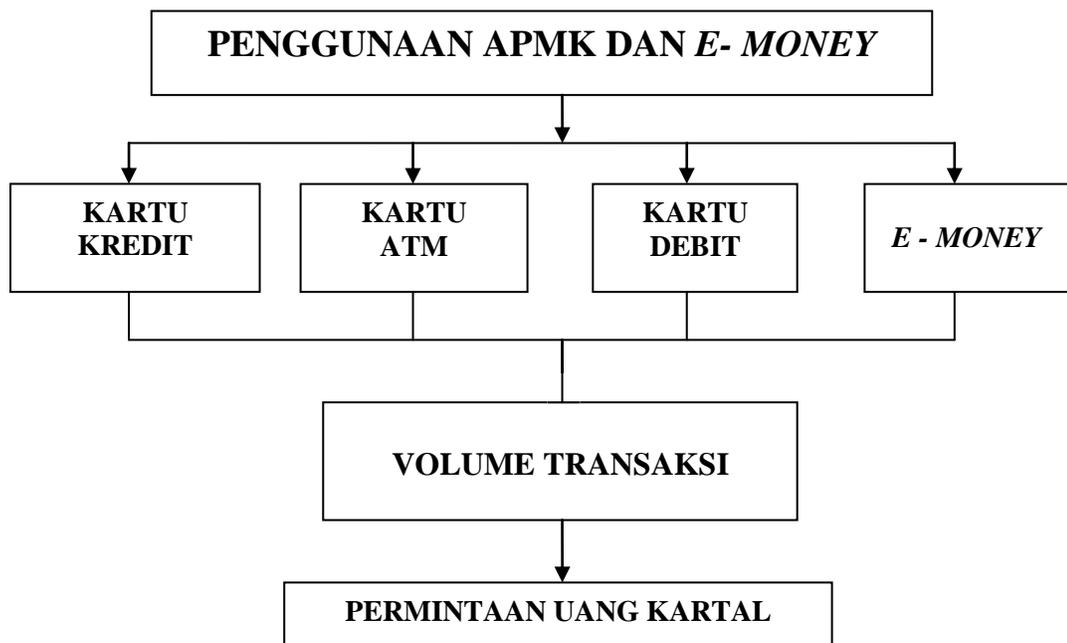
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, terungkap bahwa kajian empiris antara sistem pembayaran elektronik dengan kartu yaitu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan *e-money* yang dilaksanakan di Indonesia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji pengaruh penggunaan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan *e-money* terhadap permintaan uang kartal di Indonesia.

Permintaan uang merupakan salah satu parameter utama yang diperhatikan dan dikaji dalam pengambilan kebijakan moneter. Oleh karena itulah, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan *e-money* terhadap permintaan uang kartal di Indonesia dalam jangka pendek.
2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan *e-money* terhadap permintaan uang kartal di Indonesia dalam jangka panjang.

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki fokus dalam mengkaji pengaruh penggunaan kartu pembayaran elektronik (*proxy volume transaksi* dari kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan *e-money*) terhadap permintaan uang kartal. Keterkaitan antara latar belakang serta perumusan masalah dengan variabel-variabel penelitian diuraikan pada diagram alir (*flow-chart*) dalam Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berperan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan membantu membuat rancangan kesimpulan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga penggunaan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan *e-money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan uang kartal di Indonesia dalam jangka pendek.
2. Diduga penggunaan APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan *e-money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan uang kartal di Indonesia dalam jangka panjang.

F. Ruang Lingkup

Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup APMK (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit) dan *e-money* terhadap permintaan uang kartal (*money demand*) di Indonesia. Menurut ahli ekonomi J.M. Keynes, permintaan uang adalah yaitu permintaan uang sebagai alat transaksi dan berjaga-jaga serta untuk spekulasi. Untuk mengetahui hubungan penggunaan APMK dan *e-money* dengan permintaan uang kartal digunakan variabel dari masing-masing alat pembayaran non tunai tersebut. Variabel tersebut adalah volume transaksi dan nilai transaksi dari kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan *e-money*.